

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum perbatasan maritim alternatif oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan tidak dapat dilepaskan dari mobilisasi memori politik yang kuat dan terstruktur. Melalui pendekatan *mnemonical security*, Tiongkok mengonstruksi narasi sejarah yang menekankan kejayaan maritim masa lalu, seperti ekspedisi Cheng Ho dan klaim atas *Nine-Dash Line* untuk mendukung klaim kedaulatan kontempornya. Narasi-narasi ini direproduksi dalam diskursus publik dan pendidikan nasional dan diinstitusionalisasi dalam kebijakan luar negeri, dokumen hukum domestik, serta simbol-simbol kenegaraan. Dengan cara ini, memori politik berfungsi sebagai alat pembentukan identitas nasional sekaligus dasar legitimasi hukum atas klaim maritim yang bertentangan dengan UNCLOS.

Strategi Tiongkok tidak berhenti pada konstruksi narasi sejarah, tetapi meluas ke bentuk *lawfare*, yakni penggunaan hukum sebagai instrumen resistensi terhadap norma internasional yang dianggap hegemonik. Tiongkok membentuk hukum domestik yang menyerap narasi historis, seperti UU Zona Ekonomi Eksklusif 1998 dan UU Keamanan Maritim 2021, serta memperkuat peran *China Coast Guard* dalam membela klaim wilayah. Selain itu, Tiongkok aktif menolak putusan Mahkamah Arbitrase 2016 dan memilih jalur bilateral atau forum *non-binding* seperti *Code of Conduct* (CoC). Hal ini mencerminkan pilar kedua dan ketiga teori Malksoo, yaitu *securitization of memory* dan *memory resistance*, di mana memori dijadikan landasan kebijakan hukum sekaligus alat perlawanan normatif terhadap

tekanan hukum internasional. Dengan demikian, Tiongkok membangun sistem hukum paralel yang mengedepankan legitimasi berbasis sejarah dan kepentingan nasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa memori politik merupakan determinan strategis dalam kebijakan maritim Tiongkok yang digunakan untuk membentuk dan mempertahankan hukum perbatasan alternatif di Laut Cina Selatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap literatur hubungan internasional kritis dan hukum laut dengan menunjukkan bagaimana identitas historis dan ingatan kolektif dapat dioperasionalkan sebagai kekuatan normatif.

5.2 SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas fokus kajian tidak hanya pada Tiongkok sebagai aktor tunggal, tetapi juga melakukan studi komparatif dengan negara-negara pengklaim lainnya seperti Filipina atau Vietnam untuk memahami dinamika regional secara lebih menyeluruh. Selain itu, kajian lanjutan dapat mengeksplorasi persepsi masyarakat domestik dan internasional terhadap mobilisasi memori politik Tiongkok melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji hubungan antara strategi memori politik dan instrumen ekonomi seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), serta melakukan analisis hukum komparatif yang lebih mendalam antara kerangka hukum domestik Tiongkok dan ketentuan UNCLOS. Dengan pendekatan interdisipliner dan cakupan yang lebih luas, studi-studi berikutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang

lebih komprehensif terhadap strategi normatif Tiongkok dalam membentuk tatanan hukum internasional alternatif di Laut Cina Selatan.

